

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERBUATAN DEMONSTRASI MAHASISWA**

(Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

TRI SETIAWAN

NPM:1521020175

Jurusan: Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERBUATAN DEMONSTRASI MAHASISWA
(Studi di Universitas Islam Negeri Raden Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

TRI SETIAWAN

NPM : 1521020175

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 / 2019 M**

ABSTRAK

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Lampung)

Oleh

TRI SETIAWAN

1521020175

Di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan perjalanan Demonstrasi pernah terjadi, karena merupakan contoh menyampaikan pendapat di muka umum dalam Negara demokrasi. Sehingga secara umum akan diketahui bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perbuatan Demonstrasi Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Lampung. Terutama Pendapat Dosen, Pejabat dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Seperti diketahui Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk menyampaikan pendapat berupa saran, kritikan, pendapat dan lain sebagainya. Demonstrasi yang merupakan hak dari HAM untuk mengeluarkan pendapat berubah menjadi anarkis, merusak fasilitas publik terutama kampus. Karena mahasiswa wadah organisasi untuk mengembangkan bakat minat mereka, untuk mengembangkan kemimpinan, untuk mengembangkan kepribadian mereka mereka melalui aktivitas-aktivitas di dalam organisasi.

Dalam hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: jenis penelitian lapangan (*Field Research*), sifat penelitian *deskriptif kualitatif*, metode pengumpulan data observasi, intervie dan dokumentasi, metode analisis data menggunakan analisa *kualitatif* yang bersifat *induktif*.

Kesimpulan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang perbuatan demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata yang keji. Sebab Allah tidak menyukai ucapan yang buruk (mencaci maki orang, menerangkan keburukan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, dan sebagainya), dengan terus terang kecuali terhadap orang yang dianiaya. Hukum Islam memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, dimana perbedaan tersebut terlihat dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan, serta persamaannya yaitu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan seluruh masyarakat. Sedangkan hukum positif Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarama I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

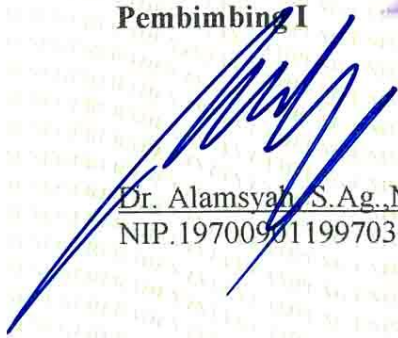
PERSETUJUAN

Nama : Tri Setiawan
NPM : 1521020175
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : "PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PERBUATAN DEMONSTRASI
MAHASISWA" (Studi di Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung)**

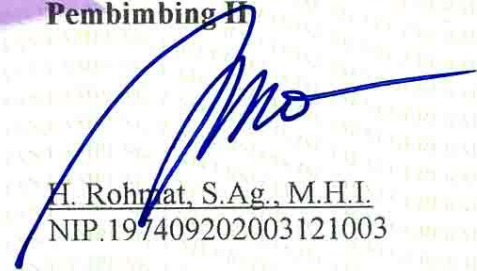
MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah Raden Intan Lampung.

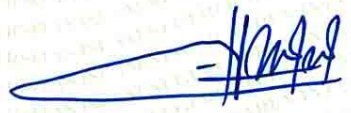
Pembimbing I


Dr. Alamsyah S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002

Pembimbing II


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP.197409202003121003

Ketua Jurusan Siyasah


Dr. Nurnazli, S.H., SAg., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PERBUATAN DEMONSTRASI MAHASISWA”**
(Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) disusun Oleh
Nama: Tri Setiawan NPM: 1521020175, Program Studi : Siyasa Syar'iyah
(Hukum Tata Negara)

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**



Khairuddin, M.H.

Nr. 1902102199930311002

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص . يَقُولُ (: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ أَلَاءٍ يُمَانٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Said Al-Khudri R.A berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW\ bersabda: "*Barangsiapa diantara engkau semua melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya (dengan kekuasaannya), jikalau tidak dapat dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya (dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi) dan jikalau tidak dapat juga dengan lisannya, maka dengan hatinya (maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu (yakni dengan hati saja) adalah selemah-lemahnya iman.*" (H.R. Muslim).¹



¹ Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin* (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicitak Oleh: CV. Pustaka Assalam, h. 81.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku ayahanda hendrik dan Ibu Pri Hartini yang telah tulus Ikhlas membesarkan, membiayai, serta mendoakanku hingga aku dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, senyum bahagia kalian menjadi tujuan terbesar dalam hidupku, semoga Allah selalu melindungimu dimanapun berada.
2. Kakak-kakakku Andre Saputra, Dwi Yahya Darmawan dan Adeku Ulfa Putri Hanifah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan demi keberhasillanku.
3. Sahabat-sahabat riga, ainal, nisa, rahma, desti, kharisma zulfikar, yang selalu menemani dalam suka maupun duka, serta memberikan dukungan kepadaku.
4. Sesorang Spesial yang selalu mendukung dan mendampingiku untuk menyelesaikan studi di Univrsitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Teman-teman Siyasah A yang saling mendukung dan menemani dibangku perkuliahan.
6. Teman-temanku seperjuangan ainal, zulfikar, hardi, riga, delpi yang selalu memberikan motivasi.
7. Seluruh dosen yang selalu Ikhlas memberikan Ilmunya, semoga bermanfaat bagiku di dunia akhirat.
8. Yang kubanggakan Alamamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Tri Setiawan, lahir pada tanggal 23 Agustus 1996 di Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame, kota Bandar Lampung. Merupakan putra ke-3 dari pasangan bapak Hendrik. dan ibu Pri Hartini.

Pendidikan yang pernah ditempuh :

1. SDN 2 Harapan Jaya, Sukarame, Bandar Lampung, 2009.
2. SMP PGRI 6 Bandar Lampung, 2012.
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, 2015.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasah Syar'iiyah (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk *Nabiullah* Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERBUATAN DEMONSTRASI MAHASISWA (Studi di Universitas Islam Negeri Lampung).”**

Skripsi ini merupakan nagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada progam Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. H. Moh Mukri, M,Ag** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri raden Intan lampung. Serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.

2. **Dr. H. Khairuddin, M.H.** selaku dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. **Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. **Dr. Alamsyah, M.Ag** selaku pembimbing I dan **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Mahasiswa Jurusan Siyasah Angkatan 2015. Khususnya kelas tempatku menuntut Ilmu dibangku perkuliahan, kelas Siyasah A, teman-teman seperjuangan KKN kelompok 104 desa Malang Sari Lampung Selatan, teman-teman seperjuangan PPS kelompok 28 Pengadilan Agama Tanjung Karang, semoga kesuksesan akan selalu membersamai kita semua.

Saya sebagai penulis berharap semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam

pembuatan skripsi dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai Amal dan

Ibadah, *Amin Yaa Robbal'Alamin.*

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 3 Mei 2019

Penulis

Tri Setiawan

1521020175



DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------------|---|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| F. Metode Penelitian | 7 |

BAB II DEMONSTRASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian demonstrasi Islam dan Demonstrasi Hukum Positif | 14 |
| B. Dalil Aturan Hak Menyatakan Pendapat Dalam Hukum Islam | 32 |
| C. Dasar Demosntrasi dalam perundang-undang di Indonesia..... | 38 |
| D. Dasar Aturan Hak Unjuk Rasa/Demo dalam Peraturan di Universitas Islam Raden Intan lampung | 41 |

BAB III PENYAJIAN DATA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung..... | 43 |
| B. VISI, MISI, Tujuan dan Karakteristik UniversitasI slam Negeri Raden Intan Lampung | 51 |
| C. Unjuk Rasa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | 53 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D. Pendapat Dosen-Dosen, Mahasiswa dan Pejabat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tentang Unjuk Rasa Tersebut..... | 57 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Unjuk Rasa Tersebut..... | 65 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya terlebih dahulu penelitian akan menegaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat judul ini. Untuk menghindari akan terjadinya kesalahan pemahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi “**Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)**” yaitu sebagai berikut :

Hukum Islam adalah secara klasik hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Tuhan dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Pemahaman ini berunjuk kepada istilah *fiqh* dalam arti produk hukum sistematis yang disusun manusia berdasarkan sumber utama ajaran Islam. Di kalangan pemikir muslim, Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memasrakan diri pada tuhan. Hukum memasrahkan diri kepada tuhan dapat disebut hukum alami dan bukan Isani. Hukum alami (phisika) dapat ditemukan oleh ahli-ahli ilmu alam, dan hukum Isani dapat ditemukan oleh para *filsuf* moral.²

² Ahmad Hasan Ridwan ”*Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam*”. (AL-ADALAH Vol XIII, No. 1 oleh UIN raden intan lampung juni 2016), h 96 (On-Line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (19 Agustus 2019, 18:37), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini disuatu Negara, dalam hal ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang dalam suatu masyarakat tertentu bagi daerah tertentu.³

Perbuatan adalah berbuat yang mempunyai sifat tersebut merupakan suatu sikap jasmani yang disadari dalam hal ini yang dilakukan perbuatan manusia yang berbuat (positif) dan tidak berbuat (negative).⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama⁵ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memiliki Lima Fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.⁶

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada Universitas.⁷

³Irwantoni, *Buku Daras: Ilmu Hukum Seri Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Puski ma Fakultas Ushuludhin, 2009), h. 101.

⁴ Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta 1976

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017, *Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, Bab 1 Kententuan Umum Pasal 1 No 1.

⁶ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* (Jakarta;Restu Agung, 2006) cet. 1 h. 26

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017, *Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, Bab 1 Kententuan Umum Pasal 1 No 28.

Menyatakan pendapat di muka umum adalah salah satu hak-hak asasi manusia (HAM). Ia merupakan hak kemerdekaan dasar yang dimiliki setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia yang harus mendapat jaminan hukum yang adil dari Negara. Di Indonesia sendiri, kemerdekaan berpendapat merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan”. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 menegaskan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.⁸

Jadi dengan demikian dari uraian istilah judul yang dikemukakan di atas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pembuatan Demonstrasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang memotivasi untuk memilih dan membahas judul skripsi **HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERBUATAN DEMONSTRASI MAHASISWA**, yaitu:

1. Alasan Objektif

Kajian meninjau pernah terjadi perbuatan demonstrasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Lampung yang berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

⁸ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum* (Jakarta; Restu Agung, 2006) cet. 1 h. 26

2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini diangkat dikarenakan sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Pilihan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia sudah ditentukan pada masa kemerdekaan dan sampai saat ini demokrasi masih dijadikan sebagai satu-satunya sistem yang dipilih oleh pemerintahan Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Sampai Reformasi mempunyai Visinya masing-masing. Ketika masa pemerintahan Orde Baru, demokrasi belum berjalan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.

Di Indonesia sendiri, kemerdekaan berpendapat merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan”. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menegaskan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.⁹ Ditambah laginya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum Pasal 9 ayat (1) yang membolehkan menyampaikan pendapat dengan cara Unjuk Rasa atau Demonstrasi.

⁹ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* (Jakarta; Restu Agung, 2006) cet. 1 h. 36

Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berunjuk rasa atau berdemonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menterjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi Unjuk Rasa atau Demonstrasi.

Dalam wacana Islam, demonstrasi disebut (*muzhahaharah*), yaitu sebuah media dan sarana penyampain gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyi'arkannya dalam bentuk pengerahan massa. Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga Negara Islam dengan syarat bahwa hak itu diguakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan.¹⁰

Dalam bahasan soal kebebasan berpendapat, Wahbah az-Zuhaily melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. Prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut kepada siapapun, meskipun itu menyangkut pemerintahan.

Dalam catatan sejarah Islam awal ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah-musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk

¹⁰Abu a'la almaudi, *hak-hak asasi manusia dalam islam*, penerjemah bambang iriana djajatmadja, (Jakarta;bumi aksara,2005), h.30.

memberikan berbagai masalah. Tapi disamping kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, Islam juga memberikan batasan-batasan dalam rangka menghargai hak-hak orang lain.¹¹

Disisi lain, pendapat Dosen Mahasiswa dan pejabat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung aksi-aksi dalam perbuatan anarkis mahasiswa tersebut contohnya, pada aksi PEMIRA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung banyak sekali perbuatan kerusuhan yang terjadi kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah dapat disimpulkan bahwa maksud dari Pendapat Dosen mahasiswa dan pejabat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang perbuatan demonstrasi mahasiswa dalam menyatakan pendapat dalam *Hukum Islam* dan Hukum Positif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, kiranya dapat dikemukakan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tentang perbuatan demonstrasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tentang perbuatan unjuk rasa mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

¹¹Ibnu Taymiyah, *kumpulan fatwa-fatwa Ibnu taymiyah*, Jakarta darul haq, 2007.

1. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

1. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai demonstrasi dalam menyatakan pendapat.
2. Untuk menambah referensi mengenai demonstrasi dalam menyatakan pendapat.

b. Manfaat secara Praktis

- a. Memberikan wawasan kepada penulis serta semua kalangan masyarakat luas dalam menanggapi permasalahan hukum.
- b. Menambah dan memperluas wawasan Ilmu pengetahuan Syariah tentang Demonstrasi dalam menyatakan pendapat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹² Untuk Mendapatkan Data dan Informasi dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan Metode:

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis Penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilaksanakan dilapangan.¹³ Yang menjadi objek penelitian ini adalah pandangan dosen, pejabat dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang perbuatan Demonstrasi Mahasiswa dalam menyatakan pendapat.

¹²Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21.

¹³Susiadi AS *Ibid*, 10.

- b. Sifat Penelitian yaitu penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.¹⁴

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek penelitian.¹⁵ Penelitian ini berlokasi di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk mengetahui pandangan Dosen, Pejabat Dosen dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang perbuatan demonstrasi mahasiswa dalam menyatakan pendapat.
- b. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.¹⁶

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 150.

¹⁵ Kartini Kartono .*Op.*, Cit. h.28.

¹⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatat secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti. Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi dua yaitu

1. Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observasi berada bersama obyek yang diteliti.
2. Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya seperti dilakukan melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto.¹⁷

b. Interview

Interview adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang dapat melihat muka yang dapat melihat muka yang lainnya dan mendengarkan telinganya sendirisuaranya.¹⁸ Sedangkan jenis *Interview* yang digunakan adalah *Interview* bebas terpimpin, *Interviewer* membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan (*Interviewer*).¹⁹

¹⁷ Nurul Zuhriah, *Metodelogi Peneltian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi Bumi*, (Jakarta : Aksara, 2007). H 45

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 192.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, h. 207.

Pengumpulan data yang penyusun peroleh dari responden untuk mengungkapkan pandangan Dosen Mahasiswa dan Pejabat Dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang unjuk rasa mahasiswa dalam menyatakan pendapat, maka responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pandangan Dosen mahasiswa dan pejabat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang unjuk rasa mahasiswa dalam menyatakan pendapat.

Interview ini digunakan sebagai metode utama di dalam penelitian ini, karena terdapat unsur penting untuk mendapatkan Informasi yang diperlukan sehingga data-data yang akurat dapat diperoleh, Metode ini digunakan untuk mencari Informasi dan Data-Data yang berkaitan dengan tentang perbuatan demonstrasi mahasiswa dalam menyatakan pendapat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.”²⁰ Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap. Data yang akan digali adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis pelaksanaan unjuk rasa mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam

²⁰ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

menyatakan pendapat. Dalam kegiatan ini dokumentasi berperan sebagai alat kontrol data-data yang diperoleh melalui wawancara.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Dosen mahasiswa pejabat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 25672 orang.

b. Sampel

Tehnik sampling yang digunakan adalah tehnik non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.²² Cara ini dianggap paling tepat untuk dipilih menjadi anggota sampel sehingga keobjektifan hasil penelitian dapat terjamin.

Sampel yang digunakan ialah *Purposive Sampling*, yaitu tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti.²³ Sampel diambil tidak secara diacak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti, Karena peneliti hanya akan mengambil sampel dengan beberapa pihak yang ada kaitannya dengan masalah

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 117.

²² Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985), h. 89.

²³ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h.

yang diteliti. Yang menjadi sampel sebanyak 150 orang, dengan rincian 20 orang Dosen/penjabat Fakultas Syari'ah, 20 orang Dosen/penjabat fakultas Tarbiyah, 20 orang Dosen/penjabat Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 20 orang Dosen/penjabat FEBI, 20 orang Dosen/penjabat Ushuludin dan 50 Mahasiswa dari 5 fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Lampung di bidang berkaitan skripsi peneliti.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁴
- b. Koding, yaitu mengklafikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori,²⁵ atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.
- d. Penyusunan atau sistematis data (*contracting atau systematizing*), yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²⁶

²⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h. 115.

²⁵ Susiadi *Ibid*, h. 115.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu “suatu prosuder penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.”²⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk mencari kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.²⁸



²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) Cet ke-1, h. 9.

²⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.34.

BAB II

UNJUK RASA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Demonstrasi Menurut Hukum Islam dan Demonstrasi menurut Hukum Positif

1. Demonstrasi Menurut Hukum Islam

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok atau beberapa orang yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu kebijakan atasan suatu kantor, organisasi, institusi, hingga pemerintah. Biasanya bentuk dari demonstrasi berupa menyetujui suatu kinerja hingga kritikan terhadap suatu kebijakan pemerintah yang dimana menyulitkan dan merugikan beberapa pihak seperti halnya karyawan, ormas, bahkan hingga seluruh elemen masyarakat yang terdapat dalam suatu negara. Keterbukaan dan kritik, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sama. Kendati dalam warna atau perwujudan yang berbeda, keduanya adalah ciri makhluk rasional, sehingga sering dipergunakan sebagai barometer 'kemanusiaan manusia.

Adapun dalam bahasa Arab, Istilah demonstrasi sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Indonesia, disebut dengan beberapa Istilah, yaitu *muzhaharah* dan *masirah*. Jika *muzhaharah* yang dimaksud demonstrasi dalam *terminology* kaum sosialis yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan disertai boikot, pemogokan, kerusuhan, dan perusakan (*teror*), agartujuan revolusi mereka berhasil, maka *muzhaharah* yang dimaksud adalah sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat-

tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga disebutkan bahwa aksi *muzhaharah* tersebut biasanya diwarnai perusakan dan anarkisme.

Sedangkan *masîrah* secara harfiah adalah “perjalanan”, dalam kamus *al-Mawrîd* disebutkan bahwa *masîrah* berarti *march*, atau *long march*.²⁹ Dengan demikian yang dimaksud *masirah* adalah Istilah untuk aksi demonstrasi yang tidak disertai dengan perusakan, atau bisa disebut juga sebagai *long-march* yaitu lebih menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu tempat tertentu (pawai). Pola seperti ini disebut dengan pola *dinamis*, sebagai lawan dari pola *statis*, yaitu aksi yang dilakukan hanya diam di satu tempat tertentu, misalnya aksi mimbar bebas.³⁰

Apabila keadaan yang memungkinkan unjuk rasa Individu boleh dilakukan oleh setiap Muslim dengan memperhatikan adab dan ahklak dalam menyampaikan pendapat didepan umum dan menarik dukungan publik. Sedangkan *muzahharah jam'iyah* (unjuk rasa bersama), adalah muzahharah yang dilakukan dengan perencanaan oleh suatu lembaga Islam tertentu yang berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi kelompok.

²⁹Rohi Baalbaki, *Qâmûs al-Mawrid 'Arabî-Inkilîzî (A Modern Arabic-English Dictionary)*, (Beirut: Dar Elilm Lilmalayin, 1995)

³⁰Oleh Muhammad Aminullah, “*Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*” (Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima, El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2014) hal. 355 (On-line), tersedia di: <http://ejournal.kopertais4.or.id/> (2 Mei 2018, 22:04), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Seperti *muzhaharah I* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ketika Umar Bin Khatab dan Hamzah bin Abdul Mutholib baru masuk Islam. Rasul SAW merencanakan rumusan strateginya sedemikian rupa sehingga *muzhaharah* ini mampu membangun citra Islam dan menggalang opini yang baik dihati masyarakat saat itu. *Muzhaharah* bersifat kerja bersama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara *organisatoris* bagi kaum muslimin yang tergabung dalam lembaga yang menyelenggarakan demonstrasi (unjuk rasa) tersebut, karena merupakan hasil dari suatu musyawarah untuk melakukan aksi. Sebagaimana firman Allah SWT surat asy-syura sebagai berikut :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ (الشعراء : 38)

Artinya : dan bagi orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kamiberikan kepada mereka.³¹ (Q.S. asy-syura : 38)

Bila ada yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini, wajib baginya berpartisipasi dalam bentuk lain, misalnya dengan memeberikan dana bagi mereka yang ikut *bermuzhaharah*, menyediakan kendaraan, makanan atau atribut *muzhaharah*. Al-Qur`an dan hadist tidak secara langsung menyuruh kita untuk melakukan *muzhaharah* sebagai demontrasi, sebagaimana kita pahami sekarang ini, yang diperintahkan adalah

³¹Ibid hal. 60

menyampaikan kebenaran, sehingga menyampaikan atau memperjuangkan kebenaran adalah wajib. Di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat as-Shof ayat 9 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَهْدَىٰ وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ

كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (الصَّافَّ: ٩)

Artinya : “Dialah yang mengutus rasulNya dengan membawa petunjukNya dan agama yang benar agar dia memenangkan diatas segala-gala agama meskipun orang musyrik benci”³²

Pada ayat diatas, kalimat *liyudzirahu alad diini kullih* (agar diperlihatkan dan dimenangkan atas semua agama) menunjukkan bahwa agama Allah SWT yang mulia inibersifat terang, terbuka, jelas dan untuk dimenangkan atau diperjuangkan oleh para penganutnya. Karena itu *Muzahharah* secara bahasa dapat dikatakan memiliki dasar al-Quran yang kuat berdasarkan ayat ini.

Dari ayat Al-Quran yang kumpulkan, ini menunjukkan tentang memperjuangkan kebenaran yaitu kalimat *haq*. Maka dari sini mengambil hukum dengan menggunakan metode Qiyas/analog yaitu, mengambil `illat yang sama dengan demonstrasi hukumannya adalah boleh, bahkan menjadi wajib, bila kondisi tidak memungkinkan lagi, seperti orang yang telah nyata bertindak maksiat.

³² Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan* , (Semarang: CV Toha Putera) Cet. H. 60

Pada dasarnya segala macam *muzhaharah* atau demonstrasi yang diniatkan karena Allah SWT, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam adalah salah satu bentuk mengingkari kemungkaran. *Muzhaharah* atau demonstrasi seperti ini memiliki niat urgensi besar dalam menampilkan kekuatan kaum muslimin. *Muzhaharah* untuk membela penderitaan ummat Islam itu lebih spesifik lagi, karena memperlihatkan solidaritas ukhwah kaum muslimin terhadap saudara-saudara mereka yang dizholimi.

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, secara umum bisa disimpulkan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu gerakan, aksi atau tindakan sekelompok orang secara bersama-sama untuk menyatakan pendapat di muka umum, pikiran mengenai suatu masalah atau protes terhadap suatu kebijakan baik dengan cara membawa poster, tulisan, dan sebagainya. Namun dalam terminologi bahasa Arab sebagaimana disebut di atas, terdapat perbedaan antara *muzhaharah* dan *masîrah*, *muzhaharah* merupakan aksi demonstrasi yang disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, adapun *masîrah* lebih kepada aksi damai tanpa kekerasan dan dilakukan dengan *long march*.

2. Demonstrasi Menurut Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Demonstrasi bisa mengandung dua makna. Yaitu **Pertama**, demonstrasi ialah pernyataan protes yang dilakukan secara massal unjuk rasa mereka yang berbondong-bondong mengadakan menentang percobaan nuklir. **Kedua** demonstrasi

ialah peragaan atau pertunjukan tata cara yang melakukan atau mengerjakan sesuatu.³³

Istilah demonstrasi ini didefinisikan oleh beberapa pendapat para ahli yakni di antaranya; Tayar Yusuf yang menyatakan bahwa Istilah demonstrasi berawal dari kata *demonstration* yang memiliki arti memperagakan atau menampilkan proses keadaan sesuatu. Sedangkan menurut Pius A. Pratanto, Demonstrasi diartikan sebagai tindakan bersama-sama dengan tujuan mengupayakan proses pertunjukan mengenai cara penggunaan suatu hal.³⁴

Unjuk rasa atau demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seorang atau lebih dengan tujuan mengeluarkan pendapat didalam pikiran dengan menggunakan, lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat umum.³⁵

Dalam kamus Ilmiah Populer demonstrasi adalah unjuk rasa untuk melakukan tindakan bersama untuk menyatakan protes pertunjukan mengenai tata cara yang penggunaan suatu alat (kekuatan yang mencolok).³⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di

³³ Frista Artmanda W, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media)

³⁴ Oleh H Haryanto, *Metode Demonstrasi* (Skripsi yang dibuat tentang Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011), hal.1. (On-line), tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id/2426/> (2 Mei 2018, 21:24), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁵ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Undang-undang unjukrasa* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1991), hal. 250.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), hal. 250.

³⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya:Arloka, 1994) h. 100.

Muka Umum. Pasal 1 ayat 3 dijelaskan unjuk rasa atau demonstrasi adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara di muka umum.³⁷ Demonstrasi atau unjuk rasa yang merupakan kegiatan aksi yang dilaksanakan oleh beberapa komponen organisasi masyarakat terhadap satu kebijaksanaan pemerintah.

Demonstrasi juga biasa disebut dengan unjuk rasa karena kedua kata tersebut memiliki makna yang hampir sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa demonstrasi adalah gerakan atau tindakan bersama-sama untuk menyatakan protes baik dengan pawai, membawa poster-poster, serta tulisan-tulisan yang merupakan pencetus perasaan atau sikap para demonstran mengenai suatu masalah.³⁸ Sedangkan unjuk rasa adalah protes yang dilakukan secara massal.³⁹

Adapun protes adalah pernyataan dari suatu kelompok atau perseorangan yang tidak menyetujui atau menyangkal terhadap suatu kebijaksanaan atau keputusan yang merugikan.⁴⁰ Selain dari pengertian yang tertuang dalam kamus tersebut, dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi juga didefinisikan sebagai: “Kegiatan

³⁷ Undang-undang nomor 9 Tahun 1998

³⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, cet. III, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 900

³⁹ Ibid 250

⁴⁰ Ibid 900

yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.⁴¹

Aturannya Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 mengenai Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahkan bukan hanya mengatur tentang dan kewajiban para unjuk rasan tersebut. Akan tetapi, dari Undang-undang tersebut mengenai peraturan tentang prosuder penyampaian pendapat di muka umum dengan cara jalur demonstrasi, yaitu para demosntrasi wajib melaporkan atau memberitahukan kepada pihak aparat pemerintahan (polri) sebelum aksi demonstrasi dilaksanakan. Sebagaimana yang di maksud dalam pasal 10 ayat (1), isi dari pasal tersebut yaitu, “penyampaian pendapat di muka umum (dengan cara demonstrasi) wajib di beritahukan secara tertulis kepada polri”.

Di Indonesia sendiri, kemerdekaan berpendapat merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan”. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menegaskan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.⁴² Ditambah laginya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka mum Pasal 9 ayat (1) yang

⁴¹Pasal 1 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998

⁴²Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* (Jakarta;Restu Agung, 2006) cet. 1 h. 36

membolehkan menyampaikan pendapat dengan cara Unjuk Rasa atau Demonstrasi.

Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berunjuk rasa atau berdemonstrasi.

Dalam suatu Negara demokrasi sangat dijunjung tinggi kebebasan berpendapat, karena kebebasan berpendapat tersebut merupakan suatu indikasi dari Negara demokrasi, dan hal tersebut sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan Negara yang bersangkutan. Rakyat diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan, karena dalam suatu Negara demokrasi, pengambilan keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapaimufakat, disinilah hak rakyat untuk memberikan suara, saran-saran, tanggapan-tanggapan apakah secara langsung (system demokrasi langsung) ataupun secara perwakilan (system demokrasi klasik).⁴³

Semenjak tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterapkan beberapa bentuk demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila hingga saat ini. Sehingga demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Hal ini terbukti dalam aturan kenegaraan maupun Undang-Undang Dasar sebagai suatu landasan

⁴³ Ismail Yusanto, *Islam Idiologi* (Jawa Timur : Al-izzah, 2004) h. 102

konstitusional terdapat pembahasan yang cukup mendetail tentang kebebasan berekspresi tersebut.

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan menyatakan kehendak merupakan salah satu hak dasar dari warga Negara dan diakui serta dijamin oleh undang-undang. Kebebasan yang menyatakan pendapat, terutama dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi atau pengarahannya perlu diatur agar tidak melanggar kebebasan orang lain dan tidak menimbulkan akses yang merugikan kepentingan publik. Penyampaian pendapat di muka umum adalah refleksi dari suatu kecenderungan atau fenomena yang dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial.⁴⁴

Masalah kebebasan individu dalam demokrasi, maka kebebasan mengeluarkan pendapat atau demonstrasi bukannya hanya sekedar bebas berpendapat dan berbuat, melainkan harus pula disertai dengan tanggung jawab yang besar atas penggunaan kebebasan tersebut. Hal ini sesuai dengan tendensi utama demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang dikehendaknya sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam hal ini, sudah sewajarnya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka tercapainya kemakmuran yang merata. Secara psikologis Individu dan Negara (*Nation*) memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Menurut Ernest Renan,

⁴⁴ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* (Jakarta: Restu Agung, 2006) cet. 1 h. 60

Nation adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual suatu solidaritas yang besar yang berbentuk oleh perasaan yang timbul akibat pengorbanan-pengorbanan yang dibuat dan dalam masa depan hal tersebut dapat dibuat lagi. Relasi individu dan Nation tercermin pula dalam bentuk peranan-peranan yang ada dalam diri individu itu sendiri yang terampung dalam unit-unit lingkungan social yang lebih makro. Hubungan langsung individu dan Nation di ekspresikan melalui posisinya sebagai warga Negara.⁴⁵

Beberapa nilai tersebut secara substantif yakni diantaranya adalah keadilan, kejujuran, amanah, supremasi hukum, kesetaraan manusia tanpa membedakan gender, menghormati atas keyakinan agama orang lain, dan sebagainya.⁴⁶ Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai realisasi pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, Pemerintahan BJ Habibie, dapat mensikapi gejala demonstrasi, mimbar bebas dan sebagainya dengan menerapkan Undang-undang tersebut.⁴⁷

Demonstrasi atau unjuk rasa mahasiswa dimuka umum merupakan gerakan moral tanpa adanya pemaksaan kehendak. Mahasiswa sering tidak mengetahui atau menyadari bahwa ada pihak-pihak ketiga yang menumpang kepentingan dalam gerakan moral mahasiswa. Dalam

⁴⁵ Munandar Suleman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Eresxo, 1990) Cet VI h. 68

⁴⁶ Siti Mahmudah, *Politik Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia* (Pemikiran Mahmud MD) (Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 4 oleh UIN Raden Intan, Lampung, 20 juli 2012), h. 408 (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (20 Mei 2019, 13:09), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁴⁷ *Op Cit.* Abdussalam, h.2-7

menghadapi pihak-pihak ketiga yang telah membaaur dengan mahasiswa, pasukan pengendali massa sulit mengambil tindakan keras kepada mereka yang melakukan tindakan anarkis.

Akibatnya sering terjadi dimana demonstrasi yang semula sebagai gerakan moral berubah menjadi pemaksaan kehendak, agar pemerintah melaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Hal itu juga, selain dengan penyusupan, juga disebabkan pejabat atau pengusaha yang menjadi sasaran unjuk rasa atau demonstrasi, menolak untuk menerimanya dan tidak terjadi komunikasi serta tidak bersedia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan aspirasi dan pendapat rakyat.⁴⁸

Gerakan mahasiswa sampai saat ini tetap konsisten sebagai gerakan moral. Sedangkan sikap dan tindakan pemerintah masih tetap arogan dan tidak mau mendengarkan aspirasi warga dan rakyatnya serta tidak mau memenuhi tuntutan dan harapan rakyatnya. Padahal pemerintah Indonesia berbentuk kedaulatan rakyat, yang seharusnya menerima dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan harapan rakyatnya. Pemerintah masih tetap bersikap melaksanakan kehendaknya tanpa memperhatikan tuntutan dan harapan warga dan rakyatnya.

Secara teori dan normatif kemerdekaan menyampaikan pendapat memang benar mendapat perlindungan hukum. Tetapi realita dilapangan ternyata mereka dikekang dan dibatasi kebebasannya untuk mengeluarkan pendapat atau menyalurkan aspirasi. Begitu mereka bertentangan dengan

⁴⁸*Ibid* : abdussalam H. 289

pemerintah, mereka ditangkap, ditahan dan diproses hukum. Sedangkan bagi pejabat-pejabat atau instansi-instansi menolak dan tidak menerima massa unjuk rasa atau demonstrasi untuk menyampaikan pendapat tidak diberi sanksi apa-apa.

Oleh karena itu, dampak negative dari unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa menjadi tanggungjawab penuh pemerintah. Pemerintah semakin arogan dalam mengambil tindakan kekerasan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya tanpa adanya kepedulian dari pemerintah. Unjuk rasa atau demonstrasi yang digelar mahasiswa bertujuan untuk menyadarkan pemerintah bahwa apa yang dilakukan pemerintah telah banyak menyimpang dari kedaulatan rakyat. Untuk itu seharusnya pemerintah menerima dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan harapan warga dan rakyatnya. Bila pemerintah menerima dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan harapan warga dan rakyatnya, maka dampak negative tersebut tidak akan terjadi.

3. Sejarah Praktik Demonstrasi Dalam Islam

Sejarah mencatat bahwa unjuk rasa atau demonstrasi pernah terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memang dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat populis. Saat ia masuk (awal) Islam, Utsman bin Affan naik menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab lewat prosedur formatur.⁴⁹

⁴⁹ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasri' : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok : GramataPublishing, 2010), h.93

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan rakyat pada saat itu karena kebijakan-kebijakan Utsman yang dinilai *controversial*. Sehingga banyak yang mengkritik dan melakukan pemberontakan untuk menurunkan Utsman dari kekhalifahan. Sebagian ahli sejarah menilai, bahwa Utsman melakukan nepotisme. Ia mengangkat sanak saudaranya, dalam jabatan-jabatan strategis yang paling besar dan paling banyak menyebabkan suku-suku dan kabilah-kabilah lainnya merasakan pahitnya tindakan Utsman saat itu.⁵⁰

Salah satu tindakan atau kebijakan Utsman yang mengakibatkan banyak protes (demonstrasi) serta meluasnya oposisi yaitu kebijakan baru tentang tanah. Utsman mengambil beberapa kebijakan yang jauh berbeda dengan para pendahulunya (Abu Bakar dan Umar). Dia mengadopsi sebuah kebijakan baru pada tahun 30 H.⁵¹ Yaitu jika seorang penduduk Hijaz memiliki kekayaan di wilayah yang ditaklukkan, dibolehkan baginya untuk mengganti kekayaan itu dengan kekayaan yang ada di daerahnya. Alasannya, dalam pandangan Utsman, hal ini ditunjukkan untuk mengurangi tekanan dari beberapa Badui dan budak-budaknya melahirkan banyak problema sosial.

Kebijakan ini disambut gembira oleh penduduk Hijaz. Namun izin untuk menukarkan tanah merupakan sebilah pedang yang bermata dua. Para

⁵⁰M. Abdul karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Pustaka BookPublisher, 2007), h.91.

⁵¹ Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam*, Penerjemah; Samson Rahman (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2000) h. 180.

sahabat yang memiliki tanah-tanah di Hijaz mulai menjual tanah-tanah mereka dan membeli tanah-tanah baru di berbagai provinsi. Thalhah misalnya, membeli banyak tanah dari pemiliknya yang berada di Hijaz. Kebijakan ini telah melahirkan kelas-kelas elit pemilik tanah dan tuan tanah.

Orang-orang Quraisy terkemuka yang sebelumnya hanya berkutat di Makkah akibat kebijakan Umar, kini menyebar ke berbagai Negara Islam di dunia dan mereka menjadi sumber-sumber penderitaan. Orang-orang kecil pemilik tanah menjual tanah mereka kepada para pemilik modal, yang bisa menginvestasi sejumlah uang yang dimilikinya. Orang seperti Thalhah, Zubair, Marwan bin Hakam membeli tanah dengan jumlah yang besar akibat adanya dispensasi ini.

Negara yang semula berdasarkan persaudaraan dan persamaan kini tampaknya mulai mengalami pergeseran karakter. Para elit baru mulai mengeksploitasi orang miskin dan mencari kekuasaan dan pengaruh lewat kekayaan dan kemakmuran yang mereka miliki. Maka tidaklah heran jika orang seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang terkenal, secara terangterangan di depan public memprotes keras tindakan eksploitasi orang-orang kaya atas orang-orang miskin.

Allah SWT berfirman ;

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ
الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ (الشعراء : 21)

"Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah, yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang Amat pedih. (QS. Asyuraa': 21).⁵²

Berdasarkan ayat di atas, yakni merupakan perintah Allah SWT agar senantiasa umat Islam bersatu dalam menjaga agama Allah SWT, dan melarang adanya sebuah perselisihan. Unjuk Rasa merupakan permasalahan kontemporer atau hal yang belum pernah dikenal sebelumnya dizaman Rasulullah SAW (*Bid'ah*) maupun dizaman para sahabat, namun bukan berarti setiap masalah tidak memiliki hukum dalam pandangan syariat, dikarenakan agama Islam merupakan agama yang sempurna dalam menjawab persoalan-persoalan yang berupa kaidah ataupun dalil fiqh yang disampaikan oleh ulama ahli fiqh. Demokrasi yang merupakan bentuk dari produk politik non-muslim yang berawal dari kalimat *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya pemerintahan merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah demonstrasi dan belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW.

Dalam sejarah Islam demonstrasi tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW. Namun bila dikaitkan dengan kebebasan berpendapat (*ijtihad*), Rasulullah pernah melakukannya, yakni ketika terjadi permasalahan di tengah umat Islam, dan Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah SWT untuk meminta petunjuk untuk menjawab persoalan tersebut namun wahyu Allah SWT tak kunjung datang sedangkan

⁵² Departemen Agama RI, hal. 485.

persoalan tersebut sangatlah genting. Kemudian Rasulullah SAW berjihad yang berdasarkan Al-Quran.⁵³

Kemudian pada peristiwa lain, terjadi pada tahun ke-6 H saat Rasulullah SAW memerintah kurang lebih seribu kaum muslim untuk berangkat menuju Makkah dengan maksud untuk melaksanakan ibadah umrah yang dimana tinggal sementara disebuah perkemahan yakni di daerah Hudaibiyah dan terletak tak jauh dari kota Makkah.

Masyarakatpun memprotes dan mereka tidak mengizinkan rombongan untuk memasuki kota Makkah, sehingga protes tersebut menghasilkan sebuah titik terang, yakni hadirnya sebuah perjanjian diplomatik yang dinantikan Rasulullah. yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah yang menghasilkan kebijakan yakni pelarangan kaum muslim yang hendak pergi mengunjungi Ka'bah pada tahun tersebut, akan tetapi ditangguhkan ditahun yang akan datang, serta lama kunjungan hanya dibatasi selama tiga hari, umat muslim wajib memulangkan penduduk Makkah yang pergi ke madinah dan begitu juga sebaliknya, kaum quraisy tidak diperbolehkan melarang penduduk Madinah yang ingin kembali ke Makkah, dan membebaskan rintangan bagi kabilah yang hendak bergabung kedalam persekutuan kaum quraisy atau kaum muslim.

Pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, belum nampak terjadinya sebuah peristiwa unjuk rasa atau demonstrasi. Namun upaya untuk menyampaikan aspirasi pendapat dimuka umum sudah mulai

⁵³ Abdul Majid Khon, Ikhtisar Tarikh Tasyri' (Jakarta: AMZAH, 2015), hal. 41.

nampak, yakni ketika upaya umat Islam dalam melanjutkan estafet kepemimpinan dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, yang dimana diadakanlah sebuah musyawarah dengan antusias demi menguatkan ukhuwah Islamiyah yang sangat tinggi sehingga kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. (14-15H/632-634M), yang disepakati dan dibaiat oleh kedua pihak yakni Muhajirin dan Anshar. Pemerintahan Abu Bakar R.A. berlangsung selama dua tahun. Beliau memimpin dengan cara menirukan hal yang disampaikan Rasulullah SAW hingga wafat.

Dapat disimpulkan pada sejarah praktik unjuk rasa dalam Islam, bahwasanya unjuk rasa menyampaikan pendapat sudah mulai nampak pada setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahkan saat Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. menjadi Khalifah, belum terlihat adanya unjuk rasa. Dimasa pertengahan kekhalfahan Umar ibn al-Khattab R.A., sudah mulai nampak adanya penyampaian pendapat oleh seorang tawanan Ghulam yang berujung pemberontakan. Saat Utsman ibn Affan R.A. menjadi Khalifah, protes umat Islam atau penyampaian pendapat sudah makin nampak terlihat hingga menimbulkan pemberontakan.

Dimasa kekhalfahan Ali ibn Abi Thalib R.A., aksi atau protes juga terjadi pada masa ini. Aksi tersebut di pimpin oleh kelompok yang masih keluarga muslim sendiri. Mereka ialah Thalhah, Zubair, dan Aisyah R.A. namun, yang disayangkan peristiwa tersebut terjadi hingga menimbulkan peperangan. Bahkan pemerintahan setelahnya seperti Hasan (anak Ali ibn Abi Thalib), Mu'awiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, hingga masa Islam

modern sekarang. Praktik penyampaian pendapat kebanyakan dilakukan oleh kaum muslim pasca wafatnya Rasulullah SAW, berdasarkan pemahaman dan tujuan yang tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sang Khalifah pada masa itu.

Di era modern pasca wafatnya Rasulullah SAW dan para sahabat, terkadang penyampaian pendapat atau unjuk rasa dilakukan bukan hanya semata-mata tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut, namun ada juga yang didasari adanya dukungan dan partisipasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi sangat wajar sekali bila fenomena unjuk rasa atau demonstrasi masih ada hingga sekarang ini, dikarenakan setiap orang memiliki hak, kepentingan dan kebenaran yang harus diperjuangkan.

B. Dalil Aturan Hak Menyatakan Pendapat Dalam Hukum Islam

Hak atas kebebasan menyatakan pendapat, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan yang merupakan gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan). Sebagaimana bagian dari konsekuensi logis kebebasan berpikir, Syari'at Islam menjamin kebebasan mengeluarkan berpendapat. Kemerdekaan berpikir dan menyampaikan pendapat menjadi wajib hukumnya apabila jika berisi mengenai dakwah (ajakan kepada kebajikan, Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar, atau dengan tujuan menyeru kepada kebenaran dan menuntut keadilan). Allah Berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (الإمران : 104)

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Ali-Imran {3} : 104).

Kita berangkat dari bagaimana Islam memandang Negara. Menurut Al-Ghazali: *Al-Mulku Bi al-Diin Yabqa, wa al-Diinu Bi al-mulki Yaqwa* (negara akan eksis dengan agama dan agama akan jaya dengan ditopang negara). Al-Ghazali berpendapat bahwa mendirikan negara wajib Syar’I, karena negara merupakan jaminan bagi keterbitan pelaksanaan agama dan kesejahteraan rakyat.⁵⁴

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Wahbah az Zuhaily, menetapkan beberapa prinsip yang membatasi kekuasaan pemerintah.

Yaitu pertama, pemerintah dituntut untuk melaksanakan dan merapkan syari’at. Ia sama sekali tidak memiliki alasan untuk meninggalkan tugas ini. Maka ketika Abu Bakar dan para Khulafaur Rasyidin dibai’at menjadi Khalifah, beliau berpidato :

“Taatlah kepadaku selama aku taat kepada allah. Jika aku tidak taat kepada Allah, kalian tidak wajib taat kepadaku.”⁵⁵

Kedua, pemerintah tidak memiliki kewenangan tasyri’, karena itu hanya menjadi kewenangan Allah dan Rasul. Pemerintah hanya boleh melakukan ijtihad dalam usaha menerepkan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga,

⁵⁴ Dr. j. suyuti pulungan, M.A., *Fiqh Siyasaah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) h.238.

⁵⁵ Muhammad Khudari Bik, *Itmam al-Wafa’ fi Sirah al-Khulafa’*, h.19.

dalam langkah pemerintah harus mempunyai prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam, yaitu Musyarawah (*Syura*), berbuat adil (*Al'-Adl*), persamaan di depan umum (*Al-Musawah Amam Al-Qanun*), memelihara hak asasi manusia (*Himayah Kramat Al-Insan*), menjamin kemerdekaan rakyat dalam berakidah dan berpendapat (*Hurriyah Al-Aqidah Wa Al-Fikri Wa Al-Qaul*), kontrol rakyat dan pertanggungjawaban pemerintah (*Riqabah Al-Ummah Wa Mas'uliyah Al-Hakim*).⁵⁶

Dalam bahasan soal kebebasan berpendapat, Wahbah az-Zuhaili melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. Prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut kepada siapa pun, meskipun itu menyangkut pemerintah. Maka tatkala Umar berpidato, "Rakyatku, siapa aja yang melihat ada yang bengkok pada diri saya, hendaknya dia meluruskannya," seorang *A'raby* (orang Arab pendalaman) menimpali, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau saja aku dapatkan ada yang bengkok pada dirimu, aku akan meluruskannya dengan pedangku ini." Menanggapi orang ini, Sayyidina Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan, ada di antara umat ini, orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya."⁵⁷

Inilah beberapa prinsip yang membatasi kekuasaan pemerintah menurut Islam. Selama pemerintah masih yang merupakan batas-batas ini, rakyat dituntut untuk *Sam'an wa Tha'atan* terhadap pemerintah. Karena ada dua

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-fikri, 1409H/1989M) juz VI, h.712-722.

⁵⁷ Ibid

hak pemerintah ketika pemerintahannya dipandang abash, yaitu ditaati oleh rakyat dan mendapat dukungan rakyat dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya. Tetapi jika pemerintah sudah menyimpang dari garis-garis ini, rakyat punya hak untuk mengontrol, mengoreksi dan bahkan protes kepada pemerintah.

Ada berapa hadis yang mendukung, semisal hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, berikut ini:

الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

Agama itu nasehat, untuk Allah, Rasul-Nya, para pemimpin umat dan rakyat secara keseluruhan.⁵⁸

Hadis lain- Riwayat Abu Dawud-menjelaskan:

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

Jihad yang paling afdol, adalah berkata benar di hadapan penguasa yang alim.(HR. At Tarmizi no. 2329, dishahihkan oleh al Abani dalam silsilah ash Shahihah 1/886)⁵⁹

Lebih jauh juga, Abdur Qadir Audah, dalam al-Tasyri' al-jina'i al-Islami bahkan memperbolehkan rakyat untuk mendongkel penguasa yang menyelewengan dan tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Tulis beliau:

“Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau keluar dari batas-batas prinsip, dia tidak berhak didengar dan ditaati. Bahkan,

⁵⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Buhkari, *Matn al-Bukhari*, (semarang: Toha Putra, tt) Juz I, h.20.

⁵⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Ats'as as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996,) Juz III, h.128.

dia harus mengundurkan diri, untuk (kedudukannya) diberikan kepada yang lebih berkhlayakan dan mampu memerintah sesuai aturan yang Allah tetapkan. Jika dia tidak mau undur diri secara sukarela, rakyat berhak memaksanya dan mencari penggantinya secara bebas.”

Sampai pada titik ekstrem seperti ini, *Fiqh* masih memberi pegabhsahan. Ini semua karena besarnya semangat *Fiqh* untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan berenegara. Menwujudkan keadilan semesta, merembuk personal bersama dengan cara musyawarah yang penguasa kewenang-wenangan. Pemerintah melindungi rakyat secara serius dan rakyat tunduk dan patuh terhadap pemerintah yang mengayomi mereka. Sehingga tercipta satu struktur hubungan antara pemerintah dan rakyat yang harmonis dan stabil.

Tetapi jika melihat relitas yang terjadi dewasa ini, kehidupan kebangsaan kita, banyak diwarnai oleh kecurigaan, saling meng-kambinghitamkan, *su'uddzan* dan seterusnya. Ini menimbulkan iklim yang tidak sehat. Pemerintah menyalahkan rakyat, rakyat menyalahkan pemerintah. Dan kondisi seperti inilah yang disinyalir oleh hadis Rasul-riwayat Imam Ahmad bin Hanbal :

Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian doakan dan mendoakan kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin adalah yang kalian benci dan benci kalian, kalian maki dan meamaki kalian.⁶⁰

Yang jelas, bagaimanapun keadilan adalah salah satu prinsip abadi yang harus dipegang oleh pemerintah mana pun. Sehingga, jika prinsip ini

⁶⁰ Ahmad bin Hambal abi Abdillah as-Syaibani, *Al-Musnad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991, juz IX) h.256.no24036

diabaikan, hukum Islam memandang bahwa rakyat boleh melakukan koreksi kepada pemerintah untuk kembali memperhatikan tuntutan keadilan. Dan kalau motif ini yang mendorong aksi yang akhir-akhir ini marak dilakukan, kita tidak mempunyai alasan untuk mempersalahkannya.

Namun bukan berarti hukum Islam respek terhadap gerakan *truksi* dan perusakan. Hukum Islam simpati terhadap gerakan massa unjuk rasa yang tidak menimbulkan perusakan. Karena apa pun yang menimbulkan *mudlarat* tidak dibenarkan, meskipun tujuannya adalah untuk menghilangkan kemudlaratan (penyelewengan ketidakadilan, dan seterusnya). Karena ada kaidah hukum, kemudlaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudlaratan. Sehingga yang ditolelir oleh *fiqh* adalah gerakan yang bertujuan untuk menghilangkan kemungkaran dan mengoreksi pemerintah yang keluar dari prinsip-prinsip pemerintahan menurut Islam dengan tanpa menimbulkan perusakan.

Cara menyatakan pendapat di muka umum dari pendapat ulama tentang harus adanya izin dari kepala pemerintahan atau penguasa setempat dalam menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali dalam Ilyu Ulumudin, kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, juz II halaman 342, telah memberikan jawaban secara tuntas.⁶¹ Antara lain beliau mengatakan :

Syarat ke empat (bagi penegak amar ma'ruf nahi mungkar) : Si penegak harus harus seizin Imam dan Wali. Suatu kaum telah menjadikan ini sebagai

⁶¹ Al-habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, *dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, (Pustaka Ibnu Sidah, 2008), Cet II h. 124.

syarat, dan mereka tidak memberikan hak hisbah (hak penegakkan amar ma'ruf nahi mungkar) bagi seorang rakyat pun. Persyaratan ini *fasid*(rusak/tidak benar). Sesungguhnya ayat-ayat dan berita-berita agama yang telah kami sajikan menunjukkan bahwa setiap bagi orang yang melihat kemungkaran kemudian diam dan memberikannya maka ia telah ma'siat, karena itu wajib atasnya mencegahnya kapan dan bagaimana pun ia melihatnya secara umum, dan pengkhususan dengansyarat izin dari imam adalah suatu pengambilan hukum yang tidak berdasar”

Berbeda dengan dalam Islam yang melakukan Unjuk Rasa atau Demonstrasi untuk menjalankan tugas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar tidak perlu lagi minta izin dari pemerintah. Ketika seseorang melihat kemungkaran maka wajib mencegah kemungkaran itu segera dengan semampunya, karena jika dibiarkan saja, ditakutkan menyebar luas kemungkaran tersebut. Maka oleh karena itu, dalam Islam mencegah kemungkaran tidak perlu lagi meminta izin dari pihak pemerintah, apalagi kemungkaran tersebut dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

C. Dasar Hukum Demonstrasi Dalam Perundang-Undang di Indonesia

1. Landasan Hukum Kemerdekaan Menyatakan Pendapat

a. Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 28 E

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 23

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan

memperhatikan nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 1 ayat (1)

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2)

Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung

jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Dasar Aturan Hak Unjuk Rasa/Demo Dalam Peraturan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

a. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 1 ayat (1)

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2)

Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor : 260 tahun 2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung
Rektor Raden Intan Lampung

Pasal 6 ayat d

Menyampaikan Aspirasi dan Pendapat, Baik Secara Lisan dan atau Tertulis Secara Etis, Santun dan Bertanggung Jawab;

**c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pasal 66

Membentuk Organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan saran
dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi
kemahasiswaan



BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Sejarah Universitas Islam Negeri Lampung

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tertua dan terbesar di Lampung. Dalam lintas perjalanan sejarahnya, pada April tahun 2017 UIN Raden Intan merupakan hasil Transformasi dari IAIN Raden Intan Lampung yang berkembang dalam beberapa fase, yaitu: Fase Rintisan dan Pendirian, Fase Pembangunan, Fase Pengembangan, dan Fase Alih Status.

1. Fase Rintisan dan Pendirian (1961-1973)

Pada mulanya, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ketika bernama IAIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). Yayasan ini diketuai oleh Raden Muhammad Sayyid berdiri pada 1961 sebagai yayasan sosial. Yayasan ini bertujuan membangun rumah-rumah peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam di wilayah Lampung. Pada 1963, YKIL mengadakan Musyawarah Alim Ulama se-Lampung bertempat di Kota Metro Lampung Tengah dengan agenda menghimpun potensi alim ulama dan mengintegrasikan antara tokoh-tokoh masyarakat dengan aparatpemerintah. Hasil musyawarah antara lain merekomendasikan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam dengan 2 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah. Aktivitas akademik dan administrasi lembaga ini pada awalnya dipusatkan di

Sekretariat Fakultas Hukum UNSRI Cabang Palembang di Lampung (UNILA sekarang), kemudian pindah ke Masjid Lungsir (sekarang Masjid al-Anwar).

Setahun kemudian (1964), seiring dengan berdirinya Lampung sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, Fakultas Tarbiyah dinegerikan sebagai cabang Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang di bawah kepemimpinan Syaikh Syamsuddin Abdul Mu'thi. Selanjutnya, muncul gagasan untuk membangun PTAIN di Provinsi Lampung, dengan mendirikan Fakultas Ushuludin pada tahun 1965 dengan Dekan KH. Zakariya Nawawi.

Pada 1966, aktivitas akademik ketiga fakultas yang ada dipindahkan ke Kampus Kaliawi. Pada tahun yang sama dalam rangka penegerian, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam (Yaperti) Lampung dengan ketua K.H. Zakaria Nawawi.

Yaperti bekerja keras membenahi proses administrasi dan menyiapkan proposal pengertian yayasan yang disetujui Menteri Agama dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI No. 162 Tahun 1967 tentang pengesahan susunan personalia kepanitiaan penegerian dengan struktur organisasi yang diketuai oleh Gubernur Drs. Zainal Abidin Pagar Alam. Sekretaris panitia adalah Mochtar Hasan, SH yang pada waktu itu menjabat sekretaris daerah Propinsi Lampung, sementara Bendahara dijabat oleh K.H. Zakaria Nawawi sebagai wakil Yaperti. Adapun anggota-anggotanya terdiri dari para dekan fakultas yang ada, tokoh-tokoh

masyarakat dan para ulama yang terdiri dari tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan PSII.

Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan ini akhirnya menghasilkan SK Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 26 Oktober 1968 tentang Pendirian “IAIN Al-Jami’ah Al-Islamiah Al-Hukumiyah Raden Intan”. Pemberian nama “Raden Intan” didasari pada pertimbangan bahwa di belakang nama Universitas/Institut biasanya diberi label nama kota atau nama pahlawan; dan Raden Intan merupakan pejuang bangsa yang menentang penjajahan Belanda, sekaligus penyiar agama Islam di Lampung.

Pada periode pertama, kepemimpinan institut (Rektor) dijabat oleh Mochtar Hasan S.H., dibantu M. Djuaini Zubair, SH, sebagai Sekretaris Al-Jami’ah (Kepala Biro). Tiga tahun kemudian, jabatan rektor dipegang oleh Drs. Ibrahim Bandung (1971-1973).

2. Fase Pembangunan (1973-1993)

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Rektor ke-2, Institut mulai memasuki fase pembangunan di bawah masa kepemimpinan Rektor ke-3, Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady (1973-1978). Fase ini ditandai dengan pemberian hibah tanah seluas 5 hektar di Labuhan Ratu oleh Pemda Dati I Lampung yang kemudian dibangun kampus baru untuk kegiatan administrasi dan akademik. Setelah proses pembangunagedung dan sarana prasarana rampung, aktivitas Institut pun dipindahkan dari Kampus Kaliawi ke Kampus Labuhan Ratu.

Hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Rektor ke-4, Bapak Drs. Muhammad Zein (1978-1984). Pada masanya juga, Institut mendapat hibah tanah seluas 50 hektar di Sukarame dari Pemda atas dukungan Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara (putra Lampung). Di kawasan yang baru ini didirikan 4 unit gedung perkuliahan berlantai dua yang dipersiapkan untuk kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Drs. H. Busyairi Madjidi sebagai rektor ke-5 (1984 – 1989).

Setelah bangunan-bangunan dan fasilitas penunjang dipandang memadai, maka pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan perkuliahan untuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin secara resmi dipindahkan ke kompleks Kampus Sukarame, sedangkan untuk Fakultas Syari'ah, termasuk Rektorat, kegiatannya masih berlangsung di Kampus Labuhan Ratu. Pada masa rektor ke-6 yang dijabat Drs. H. Pranoto Tahrir Fatoni (1989-1993), pembangunan fisik terus digalakkan, antara lain dengan membangun gedung Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan. Di samping itu, ia juga melakukan upaya-upaya penataan administrasi umum, terutama administrasi keuangan, serta bidang akademik dan kemahasiswaan.

3. Fase Pengembangan (1993-2015)

Gelombang pengembangan Institut mulai dilakukan secara intensif pada masa kepemimpinan rektor ketujuh Drs. H.M Ghazi Badrie (1993-1997), ditandai dengan peresmian Fakultas Dakwah yang telah dirintis

sejak tahun 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 397 tahun 1993, sehingga jumlah Fakultas yang ada di lingkungan Institut menjadi empat sebagaimana sekarang ini. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA. (1998-2002) yang menjabat rektor ke-8 melanjutkan upaya pengembangan akademik ini antara lain dimulai dengan pemindahan seluruh kegiatan Rektorat yang semula berpusat di Kampus Labuhan ke Kampus Sukarame, sekaligus menandai perpindahan secara resmi kegiatan akademik Institut ke Kampus Sukarame. Ia juga mengupayakan pembukaan Program S-2 dan Fakultas Adab.

Namun sayang, karena peminat bidang studi untuk Fakultas Adab sangat minim, maka kegiatan Fakultas ini dihentikan. Adapun program S2 terus survive diawali dengan pembahasan dalam sidang senat IAIN (sekarang UIN) Raden Intan tanggal 17 Nopember 1999, yang menyetujui untuk membuka Program Pascasarjana (S2) dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Rektor nomor 222 tahun 1999 tanggal 4 Desember 1999 tentang persiapan pendirian Program Pascasarjana (S2) IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

Surat Keputusan Rektor tersebut dikukuhkan oleh Gubernur Lampung, Ketua DPRD, Rektor UNILA dan Ormas Islam Provinsi Lampung sebagai dukungan untuk berdirinya Program Pascasarjana IAIN Raden Intan. Pada tahun 2001 Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Raden Intan mulai beroperasi dengan jumlah mahasiswa awal sebanyak 52 orang. Setahun kemudian, PPs berhasil mendapat izin operasional berdasarkan SK.

Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2002, tepatnya pada masa kepemimpinan Rektor ke-9, Prof. Dr. H.S. Noor Chozin Sufri (2002-2006). Pada masa ini dirintisnya pesantren mahasiswa (ma'had 'aly) dan dibangunnya beberapa gedung baru yaitu kantor Pascasarjana, gedung perpustakaan lantai tiga, ruang dosen Fakultas Tarbiyah dan ruang dosen Fakultas Syari'ah. Pada masa ini juga dilakukan penguatan sarana dan prasarana, serta pengembangan program studi baru.

Pengembangan dilanjutkan oleh rektor ke-10, Prof. DR. KH. Musa Sueb, MA. (2006-2010) dengan kebijakan peningkatan mutu akademik mahasiswa dan dosen, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan akademik bahasa asing, dan pembinaan Pesantren Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah di lingkungan kampus. Pengembangan prodi-prodi baru pada program S1 dan S2 juga dilakukan, di antaranya: Prodi Tadris Matematika, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Prodi Tadris Biologi, Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), pada Fakultas Tarbiyah, Prodi Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah, Prodi Pemikiran dan Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin, dan Prodi Perdata Syari'ah pada Program Pascasarjana (PPs).

Musa juga mendorong pemberdayaan unit-unit pelaksana teknis dan lembaga penunjang akademik antara lain Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), Lembaga Penelitian (LEMLIT), Pusat Pembinaan Bahasa (PUSBINSA) dan Pusat Penjamin Mutu Pendidikan (P2MP), di samping pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga.

Pada akhir masa jabatannya, Institut ditetapkan sebagai salah satu instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010.

Laju pengembangan kampus ke arah kemajuan terus digalakkan oleh rektor ke-11 yang dijabat Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2010-sekarang) dengan motto: Semakin Unggul dan Kompetitif. Berbagai usaha pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM terus digalakkan, baik secara fisik maupun akademik. Sejumlah gedung administrasi dan sarana akademik direnovasi dan dibangun untuk memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran pun terus ditenahi dan dibangun, antara lain: hotspot, laboratorium, hingga lapangan olahraga.

Di bawah kepemimpinannya, sejumlah prestasi mulai diukir pada level nasional. Tahun 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung menduduki peringkat pertama se-wilayah Sumatera dan ketiga nasional untuk SPMB-PTAIN 2011. Tahun yang sama, masuk peringkat sepuluh besar PTAIN dari segi penyerapan anggaran.

Terhitung November 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan memiliki jurnal ilmiah terakreditasi nasional, yaitu ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Jurnal Al-‘Adalah, dan Jurnal Kalam. Dan awal tahun 2012, Program Pascasarjana membuka Program Doktor dengan Konsentrasi Hukum Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Dan masih

banyak lagi kemajuan yang dicapai dan terus diupayakan menuju visi sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif.

Selanjutnya melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1457 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 diberikan tambahan 4 izin penyelenggaraan program magister (S2) yaitu: Ekonomi Syari'ah, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Filsafat Agama, dan Manajemen Pendidikan Islam. Hingga saat ini tahun 2017 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan 8 program studi Magister (S2) dan 3 program Studi Doktor (S3).

4. Fase Alih Status (2015-2017)



Sejak tahun 2014, tepatnya bulan Mei 2014 telah selesai penyusunan proposal transformasi IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2015 Menteri Agama, melakukan studi kelayakan dengan hadirnya Direktur Jenderal Pendidikan Islam ke kampus UIN Raden Intan Lampung. Melalui perjuangan sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor, akhirnya pada tahun 2016 mendapatkan persetujuan/izin prinsip dari Presiden Republik Indonesia bahwa IAIN Raden Intan Lampung menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan motto *Intellectuality, Spirituality, dan Integrity*.

Tahun 2017 menjadi awal perubahan arah pengembangan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung dengan diterbitkannya Peraturan

Presiden Nomor 38 tahun 2017 tanggal 7 April 2017, yang juga mempengaruhi arah pengembangan UIN Raden Intan Lampung. Pada bulan April 2017, Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diundangkan, sehingga sejak 2017 diresmikan menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang disingkat **UIN RI Lampung** dengan pengembangan beberapa fakultas dan program studi bidang sains dan teknologi.

B. VISI, MISI, dan Karakteristik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

1. VISI

Terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan *Integratif-Multidisipliner* berwawasan lingkungan tahun 2035.

2. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu keislaman Integratif-Multidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing Internasional.
- b. Mengembangkan riset Ilmu keislaman Integratif-Multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan.
- c. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan: dan
- d. Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri untuk penguatan kelembangan.

3. Tujuan Pendidikan Universitas Islam Negeri Lampung

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik (*ulil ilmi*), Intelektualitas (*ulil albab*), Spiritualitas (*ulil abshar*), dan Integritas Iman, Takwa, dan Akhlaqul Karimah (*ulin nuha*), serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global;
- b. Mengembangkan atau menghasilkan kajian, riset, dan pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman secara Inovatif, Obyektif, dan Dinamis;
- c. Menyebarkan hasil riset dan pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, serta mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- d. Menghasilkan kerja sama dalam dan luar negeri yang memperkuat pengembangan Universitas sebagai rujukan internasional.

4. Tujuan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 ayat 1, tujuan pendidikan tinggi adalah:

- a. Menyapakan peserta didik, menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaan atau peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. Unjuk Rasa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Maraknya unjuk rasa merupakan gambaran atau potret buruknya kebijakan pimpinan, entah itu kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Aksiunjuk rasa sepertinya menjadi pilihan, bila kebijakan atau aturan yang dikeluarkanoleh pihak pimpinan tidak sesuai. Mungkin Negara lain yang lebihdemokratis tidak pernah terjadi unjuk rasa sesering dan semeriah di Indonesia.

Demonstrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan wadah dalam kehidupan demokrasi. Sehingga aksi-aksi demonstrasi ini tidak dapat dihindari di era demokrasi seperti saat ini. Indonesia terkhususnya kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sangat menjunjung tinggi demokrasi, sehingga aksi-aksi demonstrasi massa tidak dilarang. Namun tidak jarang aksi-aksi demonstrasi ini berujung pada tindak anarkisme. Kegiatan unjuk rasa juga marak terjadi di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk memberikan gambaran penanganan unjukrasa di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, di bawah ini disajikan jumlah unjuk rasa yang terjadi di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam kurun waktu Tahun 2018 terakhir, sebagai berikut :

1. Dari kericuhan yang mewarnai Pemilihan Raya (Pemira) di Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, Rabu, 28 November 2018. Sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami luka akibat terlibat bentrok. Diduga, keributan disebabkan oleh sejumlah oknum mahasiswa yang melakukan

provokasi. Mirhasan, anggota tim pemenangan salah satu calon presiden (capres), mengatakan, sejumlah mahasiswa menolak diadakannya Pemira.

Alasannya, kata dia, ada oknum mahasiswa yang diduga menggelembungkan suara untuk salah satu capres. "Jadi ada yang melakukan penggelembungan suara dan kita tolak. Karena sudah mencederai demokrasi kampus. Kita adakan Pemira ini satu tahun sekali," katanya Mirhasan saat diwawancarai awak media di depan gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan. Dalam Pemira Universitas Islam Negeri kali ini, ada dua pasangan capres yang bersaing. Mereka adalah pasangan Ghofar-Dinata dan Imam-Habib. Selain itu, terus Mirhasan, ada pasangan calon yang diduga memanipulasi slip pembayaran SPP." Seharusnya mahasiswa menyertakan slip pembayaran untuk mencoblos. Harusnya satu kali saja," tambah Mirhasan.

Sementara kata dia, ada mahasiswa yang melakukan pencoblosan berulang kali. Bahkan, ada oknum mahasiswa yang mengambil slip SPP rekannya untuk mencoblos capres pilihannya. Kerusuhan memuncak sekitar pukul 10.30 WIB. Situasi memanas membuat mahasiswa kedua kubu capres saling pukul. Bahkan, tidak sedikit yang melempar kursi.

Akibatnya, sejumlah mahasiswa mengalami luka di kepala dan wajah serta memar di tangan dan kaki. Belum puas sampai di situ, sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan rektorat dengan membakar ban. Tak pelak, gedung Rektorat Universitas Islam Negeri, baik di dalam maupun di luar, dipenuhi puluhan mahasiswa. Sebelumnya, kerusuhan

serupa terjadi di kampus yang sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, Jumat (20/5/2018).⁶²

2. Tidak hanya melakukan unjuk rasa. Ratusan mahasiswa juga menyegel semua gedung fakultas yang ada di kampus Islam tersebut. Seratusan mahasiswa IAIN bersama elemen aktivis yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli IAIN (AMPI), Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP), Aliansi Gerakan Perempuan (AGP), dan Seniman Kampus (Sikam) kembali menggelar unjuk rasa.
3. Selain memprotes penarikan uang infak masjid, mereka juga meminta penghapusan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum dosen. Sebelum aksi, para mahasiswa berkumpul di depan perpustakaan kampus sekitar pukul 10.14 WIB. Di sana mereka menemui lima mahasiswa yang melakukan aksi mogok makan. Mukri menjelaskan, unjuk rasa adalah hak mahasiswa. Namun, ia telah menginstruksikan kepada seluruh dosen untuk menjaga diri dari segala tuduhan pungli. "Jika ada dosen yang seperti itu, tolong tunjukkan ke saya, termasuk pungli lainnya, biar saya lakukan pembersihan dosen," katanya. Terkait pembangunan masjid, ia tak memaksa para mahasiswa untuk membayar. "Jika keberatan juga tak apa-apa, tak usah membayar," ujar Mukri. Disinggung soal perusakan kampus, ia menyerahkannya kepada polisi, terutama menindak mahasiswa yang bertindak anarkis.⁶³

⁶²<http://lampung.tribunnews.com/2018/11/28/diwarnai-aksi-saling-lempar-kursi-10-mahasiswa-uin-raden-intan-lampung-terluka?page=all>

⁶³<http://lampung.tribunnews.com/2018/11/28/diwarnai-aksi-mogok-makan-pungli-10-mahasiswa-uin-raden-intan-lampung-terluka?page=all>.

4. Selepas Shalat Jumat, massa menyusuri seluruh wilayah kampus. Mereka mengajak semua mahasiswa yang kuliah untuk ikut demo. Setiba di Fakultas Ushuluddin, mahasiswa melihat tidak ada aktivitas perkuliahan. Akhirnya, mereka menyegel gedung dekanat dengan menggunakan kayu. Lalu aksi berlanjut ke gedung-gedung lainnya, mulai dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Fakultas Syariah, hingga Fakultas Dakwah. Setelah semua Fakultas disegel, para mahasiswa menyambangi gedung rektorat. Sempat terjadi bentrok antara mahasiswa dengan petugas satpam kampus. Puluhan satpam berdiri di depan gedung rektorat untuk menghalau mahasiswa masuk.

Muhar Efendi, koordinator aksi, mengatakan, pihak rektorat harus mendengarkan suara mahasiswa. "Kampus jangan hanya diam. Hal ini menunjukkan bahwa pihak rektorat kampus ini antikritik dan tak menjunjung kebebasan mahasiswa dalam berpendapat," kata Muhar dalam orasinya.⁶⁴

Menurutnya, kampus itu merupakan miniatur negara. Kampus juga tempat strategis untuk berdemokrasi. "Kalau pihak kampus tak mau menemui mahasiswa, itu sama saja upaya untuk membenturkan mahasiswa dengan pihak keamanan," tambahnya. Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Alamsyah mengungkapkan, aksi mahasiswa ini termasuk anarkis sebab telah melakukan pemaksaan kepada para dosen untuk keluar gedung dengan cara tidak sopan. "Kita lihat saja tadi

⁶⁴Muhar Efendi, koordinator aksi, wawancara

bagaimana mereka meminta dosen untuk keluar gedung dengan dengan cara seperti itu. Saya sangat menyayangkan sekali mahasiswa melakukan ini,” ujarnya. Ia mengaku saat mahasiswa masuk ke ruang kerjanya, ia sedang menjalankan tugasnya dan sampai pintu gedung disegel oleh mahasiswa. “Padahal aksi mahasiswa ini kan tidak ada hubungannya dengan fakultas-fakultas. Atas kejadian ini, saya akan berkoordinasi dengan rektor IAIN,” kata Alamsyah bersama Wadek III Fakultas Syariah Chaidir Nasution. Sementara Rektor IAIN Raden Intan Lampung Moch Mukri saat dihubungi sedang berada di Jakarta untuk menerima surat persetujuan dari Kementristekdikti untuk peralihan status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Persetujuan langsung diserahkan oleh M Siddiq Staf Khusus Menristek Dikti.⁶⁵

D. Pendapat Dosen-Dosen Mahasiswa dan Pejabat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Unjuk Rasa Tersebut

1. Beberapa Pandangan Dosen-Dosen mahasiswa dan pejabat Mengenai Perbuatan Demonstrasi Unjuk Rasa

Unjuk rasa yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan demokrasi, karena itu demonstrasi yang merupakan salah satu hak kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum baik pendapat tersebut berupa tanggapan, lisan, saran kritikan dan lain sebagainya untuk disampaikan kepada pemerintah yang berkuasa.

⁶⁵<http://lampung.tribunnews.com/2018/11/28/diwarnai-aksi-saling-lempar-kursi-10-mahasiswa-uin-raden-intan-lampung-terluka?page=all>

Dengan diberikannya kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan fikiran dengan lisan dan tulisan diatur sepenuhnya dalam undang-undang”. Dengan adanya undang-undang tersebut membuktikan bahwa demonstrasi di Negara demokrasi merupakan suatu hak yang sangat dijaga dan dihormati sehingga siapa saja yang menyampaikan pendapat, saran, atau kritikan maka akan mendapat perlindungan dari hukum atau undang-undang.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, demonstrasi yang sering ditempuh mahasiswa khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai mekanisme penyampaian hak kritik terhadap pimpinan, dengan maraknya unjuk rasa, penulis ingin mengetahui seberapa pemahaman ungkapan unjuk rasa dengan responden yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa dan Pejabat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wawancara, Pak Chadir Nasution menurut saya tentang demo yang dilakukan mahasiswa cukup setuju. Asal dilakukan dengan tindakan wajar tidak dengan tindakan yang merusak. Karena Negara kita adalah Negara hukum yang terdapat untuk menyampaikan pendapat, tindakan demo mahasiswa sah saja dilakukan. Pesan bagi para mahasiswa yang berdemo, berdemo lah dengan akhlak yang baik tidak anarkis, jaga nama baik kampus. Demi kelancaran acara demo tersebut bertindak lah seperti manusia dewasa yang bertanggung jawab. Kebijakan pimpinan kampus di anggap kurang arif jalannya dengan demonstrasi sah-sah saja sepanjang

tidak anarkis, tidak melontarkan kata kasar, kekerasan, merusak fasilitas kampus dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Aturan unjuk rasa yang sesuai prosudereal mereka sebelum demonstrasi mahasiswa uin harus mengklarifikasi terkait pemira Warek III, Wadek III mencoba mengklarifikasi apa tuntunan mereka keinginan mereka ketika mereka ketidakpuasaan kami unjuk rasa prosudereal, terkadang mahasiswa lihat di lapangan demonstrasi dari sisi itu tidak prosudereal. Sepanjang di kampus tidak menggunakan ijin di dalam kampus kebebasan di jamin UUD.⁶⁶

Wawancara, bapak Ruhban Masykur menurut saya demonstrasi membolehkan, akan tetapi Demonstrasi itu sendiri kadang diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk mengatur tata tertib masyarakat dan juga untuk mengadakan perubahan masyarakat, menentukan kebudayaan sendiri, menentukan kebenaran bergerak, menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan, menentukan kebebasan pers, berkumpul, menganut agama atau kepercayaan dan keyakinan masing-masing tersebut. Demonstrasi yang bagus menurut saya ada etika dalam penyampain, betul-betul berangkat dari data yang dimiliki untuk membenarkan keadaan, dan perbuatan yang tidak berkenan memaksakan kehendak misalkan merusak, menghalalkan segala cara ketika unjuk rasa tapi unjuk rasa membangun sifat menggunakan akal sehat untuk merubah suatu keadaan itu yang diharapkan. Unjuk Rasa yang terjadi selama ini masih termasuk kategori

⁶⁶ Wawancara Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. Jam 10:00, 28 Maret 2019

wajar, hanya aspirasi yang di sampaikan seakan-akan memaksakan kehendak pribadi dan golongan. Tanpa mempertimbangkan kemashlatan untuk orang banyak. Tujuannya bagus, akan tetapi kepentingan umum juga perlu di pertimbangkan. Sebaiknya menyampaikan unjuk rasa itu selain ada dukungan data juga bisa memberika solusi atau jalan keluar dari masalah yang menjadi tuntutan.⁶⁷

Wawancarai Himyari Yusuf Wadek 1 demonstrasi sebenarnya lebih menyalurkan aspirasi, tetapi demonstrasi terjadi manakala dalam pandangan saya jalur demonstrasi butuh laporan sama pimpinan tidak langsung demo. Setelah melapor tidak ada tanggapi atau melarut-larut persoalan sehingga dari itu akumulasi tumpukan kecewa kelihatan dari mahasiswa perlu di demonstrasi. Tetapi mahasiswa tidak pernah mencoba berdialog tiba-tiba demonstrasi itu saya tidak setuju.⁶⁸

Menurut Hanif membolehkan demonstrasi salah satu bentuk kebebasan pendapat melalui demo di depan muka umum, demonstrasi sah sah ketika menjadi anarki merusak itu saya terus terang tidak sependapat. Itu salah satu bentuk kebebasan mengemukakan pendapat tapi jangan jalan kekerasan, merusak membakar-bakar saya tidak setuju.⁶⁹

Menurut Abdul Syukur membolehkan demonstrasi demokrasi dalam pendekatan teori politik demokrasi dari bahasa demos kratos berarti kekuasaan tangan rakyat, rakyat pemegang kekuasaan tertinggi salah satu dari lewat pemilihan sedangkan di kampus demokrasi kampus kekuasaan

⁶⁷Wawancarai Bapak Drs. H. Rubhan Masykur, M.Pd. Jam 10:00, 28 Maret 2019

⁶⁸Wawancarai Bapak Himyari Yusuf Jam 13:00, 27 Maret 2019.

⁶⁹ Wawancarai Bapak Hanif, jam 10:39, 27 Maret 2019

tertinggi dari segi pendapat mahasiswa itu ada di mahasiswa demokrasi kampus yang berkaitan dengan soal pemilihan pemimpin mahasiswa seperti Pemira dalam pemimpin mahasiswa, dalam kemahasiswaan ada organisasi mahasiswa.⁷⁰

Hardi menurut saya demonstrasi itu menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh orang-orang terbuka dimuka umum. Demonstrasi dengan cara yang benar terstruktur yaitu mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang tidak melakukan perbuatan kekerasan fisik atau anarkis dalam menyampaikan pendapatnya, dan yang disampaikan pun harus jelas maksud dan tujuan dari demonstrasi tersebut apakah atas dasar kepentingan pribadi atau demi kesejahteraan masyarakat luas. Menurut saya sudah sesuai aturan yang berlaku, namun masih adanya oknum-oknum yang menjadi provokasi sehingga demonstrasi ini dilihat oleh banyak orang terkesan anarkis dan tidak baik untuk dilakukan oleh mahasiswa yang berpendidikan, terutama di kampus Islam yang sangat kita cintai ini. Jadi demonstrasi boleh kita menyampaikan aspirasi dengan benar dan terstruktur yang tidak melakukan perbuatan anarkis.⁷¹

Menurut Ghiffari Ananda Gumay membolehkan unjuk rasa itu penyaluran aspirasi mahasiswa kepada pimpinan dalam bentuk-bentuk unjuk rasakebebasan pendapat, kemudian kebebasan berorganisasi orang berpendapat maka perlu wadah organisasi yang hal-hal baik. Unjuk rasa dalam aturan rangka demokrasi sah-sah aja walaupun dalam Islam

⁷⁰Wawancara Bapak Abdul Syukur Jam 10:30, 16 April 2019

⁷¹Wawancara Mahasiswa Syariah M Hardiansyah Kusuma Jam 09:00 1 Mei 2019

unjuk rasa itu boleh menyampaikan pendapat, tetapi dalam konteks demokrasi di Indonesia sah-sah saja sepanjang untuk menyampaikan pendapat.⁷²

Menurut Eko Apriyanto Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau umum proses penyampaian pendapat yang sudah tidak bisa diselaikan lagi melalui jalur mediasi, sehingga jalan satu-satunya adalah unjuk rasa. Demonstrasi kampus adalah miniatur negara jadi sah-sah saja agar mahasiswa belajar akan berorganisasi yang bagus menurut saya ada etika dalam penyampaian, betul-betul berangkat dari data yang dimiliki untuk membenarkan keadaan, dan perbuatan yang tidak melakukan perbuatan tindakan merusak, menghalalkan segala cara ketika unjuk rasa tapi unjuk rasa membangun sifat menggunakan akal sehat untuk merubah suatu keadaan itu yang diharapkan.⁷³

Menurut Titin Fatimah Unjuk rasa adalah menyatakan pendapat sebuah pendapat yang harus dinyatakan dalam keadilan jadi unjuk rasa sebenarnya membela sebuah kebenaran kalau memang itu dilakui oknum-oknum yang benar tanpa ada imbalan atau pencitraan. Jadi ini menyatakan pendapat yang memang untuk keadilan terutama rakyat kecil yang dilakukan mahasiswa. Unjuk rasa terjadi selama ini, sudah sesuai aturan yang dimana diperlukan kesiapan untuk memberikan masukan kepada pimpinan, dalam perubahan. Sebaiknya menyampaikan pendapat

⁷² Wawancara Mahasiswa Dakwah Ghiffari Ananda Gumay Jam 09:00 29 Maret 2019

⁷³ Wawancara Mahasiswa Tarbiyah Eko Apriyanto, Jam 13:05, 29 Maret 2019

itu selain ada dukungan dari data juga bisa memberikan solusi atau jalan keluar permasalahan yang menjandi tuntutan.⁷⁴

Menurut Apri unjuk rasa itu membuat kita belajar berdemonstrasi dengan baik karena kampus tempat pendidikan, cara salah satu agar mengetahui bagaimana system demokrasi dengan baik cara dengan pendidikan secara demokratis dengan dasari oleh undang-undang, 1. Undang-undang terbuka 2.Undang-undang Tahun 1945 berkenan Hak asasi manusia dan 3.Undang-Undang No Tahun 1998. Salah satu strategy berdemonstrasi di dalam kampus, jadi menurut saya demonstrasi di kampus sah-sah saja dengan cara tindakan yang benar, permasalahan demonstrasi perbuatan anarkis yang pimpinan harus lihat dengan tindakan anarkis tersebut.⁷⁵

Dari wawancara dapat di simpulkan bahwa pendapat dosen, pejabat dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung membolehkan mahasiswa unjuk rasa dengan caraharus dengan sopan, perbuatan yang tidak dengan kata-kata yang keji. Sebab Allah tidak menyukai ucapan yang buruk (mencaci maki orang, menerangkan keburukan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, dan sebagainya) dengan terus terang kecuali terhadap orang yang dianiaya.

Karenanya, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk membimbing dan mengajak ummat kejalan yang benar, harus dengan jalan yang bijaksana. Artinya untuk menyerukan pendapat

⁷⁴ Wawancara Mahasiswi FEBI Titin Fatimah, jam 10:30 1 Mei 2019

⁷⁵ Wawancarai Mahasiswa Ushuludhin Apri Tri Prayoga Jam 10:30, 24 juli 2019

yang benar haruslah pula diiringi dengan cara yang baik dan benar pula, sehingga yang mendengar pendapat kita mau mengikuti apa yang kita kemukakan. Unjuk rasa dalam kampus Universitas Islam ini kita harus mempunyai norma-norma keIslaman diri mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pandangan Hukum Islam dan Peraturan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Unjuk Rasa

Dalam Hukum Islam memberikan hak kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk membuat kerusakan dimuka bumi. Konsep Islam tentang kebebasan mengeluarkan pendapat jauh lebih tinggi dari pada hak yang diakui oleh dunia Barat dengan konsep demokrasi mereka (begitu juga di Indonesia). Memang hak untuk kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum guna menyebarkan kebaikan dan kebajikan bukan hanya semata-mata sebagai hak, tetapi juga sebagai suatu kewajiban. Siapa yang berusaha menyangkal hak ini terhadap rakyatnya secara terang-terangan berarti menentang Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak itu sama dengan hak dan kewajiban individu untuk berusaha menghentikan kejahatan, baik kejahatan yang dilakukan individu ataupun kelompok orang, pemerintah, negara atau pemerintah Negara lain. Terhadap hal itu ia harus mengutuk kejahatan secara terbuka dan menunjukan kepada moral yang benar dan harus dilakukan. Dapat pula dikatakan bahwa dari hak mengeluarkan pendapat ini, yang diberikan oleh Islam hak untuk menentang pemerintahan yang *tirani*, dengan menyampaikan pendapat kita yang benar, sebagaimana firman Allah SWT:

لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

(النساء : 148)

Artinya : “Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dilakukan oleh orang yang teraniaya.”

Dalam analisis hukum Islam sebenarnya upaya menciptakan kampus yang bermashlahat yang muncul kedamaian, ketenangan, kesejukan dan itu semua perlu dukungan aktivitas akademika dosen maupun mahasiswa, mahasiswa wadah organisasi mahasiswa untuk mengembangkan minat bakat mereka, untuk mengembangkan kepribadian, untuk mengembangkan kepemimpinan mereka melalui aktivitas-aktivitas ada di dalam organisasi.

Dalam menyampaikan pendapat dan pandangan Hukum Islam harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata yang keji. Sebab Allah tidak menyukai ucapan yang buruk (mencaci maki orang, menerangkan keburukan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, dan sebagainya) dengan terus terang kecuali terhadap orang yang dianiaya. Karenanya, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk membimbing dan mengajak ummat ke jalan yang benar, harus dengan jalan yang bijaksana. Artinya untuk menyerukan pendapat yang benar haruslah pula diiringi dengan cara yang baik dan benar pula, sehingga yang mendengar pendapat kita mau mengikuti apa yang kita kemukakan.

Unjuk Rasa atau Demonstrasi sebagaimana yang disebutkan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mengandung dua makna. Pertama: penerangan, peragaan, penunjukan tentang cara kerja sesuatu mesin, keluaran

dan lain-lain; Kedua: tunjuk perasaan dengan cara berkumpul beramai-ramai, berarak dan lain-lain. Inilah definisi yang menjadi topic perbincangan kita.

Tata cara penyampaian pendapat menurut Islam *amar bi ma`ruf nahi anil mungkar*, dapat dilakukan dalam tiga tahap :

- a. dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik (tangan/ kekuasaan) dalam pengertian kekuasaan untuk merubah keadaan tersebut, sehingga masyarakat menjadi baik dan tentram kembali.
- b. apabila ia tidak memiliki kekuasaan tersebut, dilakukan dengan menggunakan ucapan lisan atau tulisan.
- c. apabila juga tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk melakukan secara lisan atau tulisan, ia harus menyatakan kebencian didalam hatinya dengan jalan mengisolasi diri dan tidak ikut serta terhadap keadaan yang mungkar tersebut.

Aturannya Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 mengenai Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahkan bukan hanya mengatur tentang dan kewajiban para unjuk rasa tersebut. Akan tetapi, dari Undang-undang tersebut mengenai peraturan tentang prosuder penyampaian pendapat di muka umum dengan cara jalur demonstrasi, yaitu para demosntrasi wajib melaporkan atau memberitahukan kepada pihak aparat pemerintahan (polri) sebelum aksi demonstrasi dilaksanakan. Sebagaimana yang di maksud dalam pasal 10 ayat (1), isi dari pasal tersebut yaitu, “penyampaian pendapat di muka umum (dengan cara demonstrasi) wajib di beritahukan secara tertulis kepada polri”.

Di Indonesia sendiri, kemerdekaan berpendapat merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan”. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menegaskan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.⁷⁶ Ditambah lagi Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum Pasal 9 ayat (1) yang membolehkan menyampaikan pendapat dengan cara Unjuk Rasa atau Demonstrasi.

Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berunjuk rasa atau berdemonstrasi. Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan norma dasar Pancasila, Pasal 1 ayat 3 menegaskan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Memberi makna, negara hukum tak terpisahkan dari pilarnya, kedaulatan hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 meletakkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Berkaitan dengan itu para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia diilhami oleh pilar kedaulatan rakyat bersumber dari kedaulatan Tuhan. Kerangka ini memberi serta mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat berbasis demokrasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan

⁷⁶Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum* (Jakarta;Restu Agung, 2006) cet. 1 h. 36

rakyat negara. *Konstruksi* tersebut kemudian terkontradiksi dan terpisahkan secara tegas antara konsep ajaran negara hukum di satu pihak, dan sebaliknya negara kekuasaan di lain pihak, dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini. Pranata itu setidaknya menunjukkan, negara hukum hadir sebagai anti tesa terhadap penyelenggaraan negara berdasarkan atas kekuasaan bebas tanpa batas, hukum demokratis berdasarkan kehendak tuhan dan kehendak rakyat membatasi kekuasaan oriter/totaliter dan kesewenang-wenangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditulis di dalam bab I hingga bab IV, maka sampailah pada suatu kesimpulan mengenai Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Lampung), yang dimana hal tersebut dapat disimpulkan yakni: Istilah Demonstrasi memang tidak diterangkan secara eksplisit/jelas dalam Al-Quran. Kata demonstrasi menurut bahasa Arab dikenal dengan istilah *muzaharah* (tidak diperbolehkan) dan *masirah* (diperbolehkan) hal tersebut dapat dinilai dari pelaksanaannya. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa tersebut dihukumi boleh, tetapi tidak dengan cara perbuatan anarkis, merusak fasilitas kampus pernyataan tersebut berdasarkan alasan peraturan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk kategori *masirah*. Apabila melanggar dan tidak sesuai aturan, maka unjukrasa tidak boleh dilaksanakan karena dianggap termasuk bentuk dari *muzaharah*.

B. Saran-saran

Dari analisa dan kesimpulan diatas, maka dapatlah penulis berikan beberapa saran kepada para Demonstran yang melakukan demonstrasi dalam menggunakan hak kritik terhadap pemerintah, antara lain:

1. Agar mahasiswa demonstrasi yang dilakukan dan menjadi ciri dari perjuangan mahasiswa bisa dipertahankan, maka hendaknya para aktivis perjuangan

reformasi yang menyuarakan aspirasi hendaknya mempertahankan idealisme mahasiswa yang dimiliki, karena idealisme tersebut merupakan martabat mahasiswa yang mesti dijaga, ketika idealisme bisa diganti dengan rupiah atau harta benda, maka *legitimasi* seorang mahasiswa akan hilang, yang muncul adalah *ilegitimasi* atau saling tidak percaya, mahasiswa sudah tidak percaya kepada mahasiswa, rakyat sudah tidak percaya kepada mahasiswa, pemerintah juga sudah tidak percaya kepada mahasiswa dan sebaliknya. Yang justru terjadi adalah krisis kepercayaan satu sama lain yang mengakibatkan timbulnya akar permasalahan yang ada.

2. Aktivis adalah orang yang siap berjuang ketika hak orang lain dirampas, dan aktivis merupakan *lokomotif* pergerakan dari perjuangan tersebut, oleh karena itu, konsisten didalam berjuang tanpa mengharapkan imbalan dan fasilitas merupakan keniscayaan, dan hendaknya semua perjuangan-perjuangan tersebut agar dilakukan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridho dari Allah SWT, agar bermanfaat untuk didunia dan akhirat.
3. Para mahasiswa yang memiliki persepsi, bahwa demonstrasi hanya untuk pamer para aktivis, demonstrasi telah ditunggangi pihak ketiga dan yang menikmati hasil adalah para senior atau yang Korlap (koordinator lapangan) saja, dan sebagainya, hendaklah dibuang jauh-jauh persepsi tersebut, karena akibat yang ditimbulkan adalah timbulnya *apatisme* (keengganan mahasiswa untuk tidak berbicara dan menuruti kebijakan-kebijakan yang ada walaupun itu mengekang mahasiswa atau rakyat sendiri).
4. Perjuangan menuju perubahan belum selesai, ada banyak hal yang mesti dirubah dengan tangan pemuda/mahasiswa. Ingatlah perubahan itu berawal

dari aktivis–aktivis pemuda, tidak ada dalam sejarah yang tua bisa merubah sesuatu secara radikal. Pemuda lah yang siap untuk itu dan mengibarkan bendera merah putih di negara lain. Ketika tidak ada lagi perubahan dan terobosan baru dari pemuda berupa inovasi pemikiran dan berbagai karya, maka besar kemungkinan tidak ada kemakmuran yang akan dicapai sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 yang menjadi tujuan kita bernegara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Majid Khon, 2015, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'* Jakarta: AMZAH.

Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* Jakarta;Restu.

Abdussalam, 2006, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* Jakarta; Restu Agung.

Abu a'la almaudi, *hak-hak asasi manusia dalam islam*, penerjemah bambang iriana djajatmadja, (Jakarta;bumi aksara,2005),

Abdulkadir Muhammad, 2004 , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti Cet ke-1.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Buhkari, *Matn al-Bukhari*, semarang: Toha Putra, tt Juz I.

Abu Dawud Sulaiman bin Ats'as as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, 1996, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Juz III.

Ahmad bin Hambal abi Abdillah as-Syaibani, 1991, *Al-Musnad*, Beirut: Dar al-Fikr, juz IX.

Al-habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, 2008, *dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, Pustaka Ibnu Sidah, Cet II.

Budiman Tanuredjo, 1991, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Undang-undang unjukrasa* Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM.

Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Prenada Media Group.

Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan* , Semarang: CV Toha Putera.

Dr. j. suyuti pulungan, 1994, M.A., *Fiqh Siyasah:Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Frista Artmanda W, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media.

Hadi Sutrisno, 1985, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM.

- Ibnu Taymiyah, 2007, *kumpulan fatwa-fatwa Ibnu taymiyah*, Jakarta darul haq.
- Irwantoni, 2009, *Buku Daras: Ilmu Hukum Seri Pengantar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Puski ma Fakultas Ushuludhin.
- Ismail Yusanto, 2004, *Islam Idiologi Jawa Timur* : Al-izzah.
- Jalaludin Rahmat, 2000, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Khudari Bik, *Itmam al-Wafa' fi Sirah al-Khulafa'*.
- Munandar Suleman, 1990, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT Eresxo.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya:Arloka.
- Poerwadarminta, WJS, 1976, *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*, Bandung: Alfabeta.
- Susiadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung.
- Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset.
- Tatang M. Amirin, 1991, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Tim Penyusun, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, cet. III, Jakarta : Balai Pustaka.
- Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut:Dar al-fikri, 1409H/1989M juz VI.
- Yayan Sopyan, 2010, *Tarikh Tasri' : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok : Gramata Publishing.

B. Jurnal-jurnal

Siti Mahmudah, *Politik Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia* (Pemikiran Mahmud MD) (Jurnal Al-‘Adalah Vol. X, No. 4 oleh UIN Raden Intan, Lampung, 20 Juli 2012), h. 408 (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (20 Mei 2019, 13:09), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ahmad Hasan Ridwan”*Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam*”. (AL-ADALAH Vol XIII, No. 1 oleh UIN raden intan lampung juni 2016), h 96 (On-Line), tersedia di <http://ejournalradenintan.ac.id/>, (19 Agustus 2019, 18:37), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Ahmad Hasan Ridwan”*Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam*”. (AL-ADALAH Vol XIII, No. 1 oleh UIN raden intan lampung juni 2016), h 96 (On-Line), tersedia di <http://ejournalradenintan.ac.id/>, (19 Agustus 2019, 18:37), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Oleh Muhammad Aminullah, “*Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*” (Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima, El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2014) hal. 355 (On-line), tersedia di: <http://ejournal.kopertais4.or.id/> (2 Mei 2018, 22:04), Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Oleh H Haryanto, *Metode Demonstrasi* (Skripsi yang dibuat tentang Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011), hal.1. (On-line), tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id/2426/> (2 Mei 2018, 21:24), Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Perundang-undangan

Undang-undang nomor 9 Tahun 1998

Pasal 1 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998

D. Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa>. Diakses pada tanggal 27 Juli, jam 05:4

<http://lampung.tribunnews.com/2018/11/28/diwarnai-aksi-mogok-makan-pungli-10-mahasiswa-uin-raden-intan-lampung-terluka?page=all>.

<http://lampung.tribunnews.com/2018/11/28/diwarnai-aksi-saling-lempar-kursi-10-mahasiswa-uin-raden-intan-lampung-terluka?page=all>

